

INTISARI

Tinjauan tentang Legalitas Serikat Pekerja FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Mandiri Indonesia) dalam Beracara di Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta Sebagai Kuasa Hukum (Studi Kasus 11/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Yyk)

Pengadilan Hubungan Industrial merupakan salah satu bentuk pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan di Indonesia. Kekhususannya terletak antara lain dalam hal obyek perkara yang ditangani yang merupakan perselisihan hubungan industrial, susunan majelis hakim, kuasa hukum, jadwal pemeriksaan dan pembatasan upaya hukum untuk jenis perselisihan tertentu.

Penulisan hukum mengkaji mengenai salah satu bentuk kekhususan dari Pengadilan Hubungan Industrial yakni, pengurus organisasi pekerja/buruh yang mewakili anggotanya sebagai kuasa hukum dengan studi kasus putusan nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Yyk . Hakim pemeriksa perkara mengakui *Legal Standing* pengurus organisasi pekerja/buruh sebagai kuasa hukum mewakili anggotanya, hal ini didasarkan pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pasal 25 Undang –Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/034/SK/IV/2006. Dilihat dari sudut pandang teori organisasi pekerja/buruh dipandang sebagai Badan Hukum yang tidak tegas, dikarena keterbatasan kewenangan yang dimilikinya.

Kata Kunci : legalitas, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Kekhususan PHI

ABSTRACT

**Observation Of Legality United Labour FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Mandiri Indonesia) In Judicial Procedure Of The Court Industrial Yogyakarta As Attorney
(Case Study 11/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Yyk)**

Court of industrial is a special jurisdiction in the aorrounding of Indonesian. Especially lawsuit what will be handling of problem on industrial, council agenda, attorney, investigations schedule and restriction of law for dispute of kind in law.

The written of law will be comprehend for about a absorption type from jurisdiction of industrial is unity labour who on behalf member of firm as attorney with study case of number 11/Pdt.Sus-PHI/2014.Yyk. The Judge of investigator a dispute, recognize board of united labour as attorney. This have basicly on articles 87, number of ordinancy 2 on 2004 for about Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial and articles 25, number of ordinancy 21 on 2000 for about Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Republik Indonesia Supreme of Court with number KMA/034/SK/IV/2006.Theory of Organisation will be showed as company who is not explicitly cause competence limitness who they have.

Key word: Legality, united labour, Especially Court of industrial